

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Andri Devita; Arman Delis; Junaidi

Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Ketika diamati dari pengaruhnya dengan menggunakan model fixed effect, dapat dilihat bahwa PAD dan DAU secara simultan dan parsial dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sementara jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung. Hal ini berbeda dengan belanja tidak langsung yang memiliki efek positif karena pertumbuhan penduduk di kabupaten/kota di Jambi dapat meningkatkan alokasi belanja pegawai sedangkan untuk belanja langsung terutama untuk belanja modal tidak efisien.

Kata kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Anggaran.*

Abstract

This study aimed to analyze the influence of Locally-Generated Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and the population of the regional budget district/city in Jambi Province. Data in this research is regional budget, PAD, DAU and population. When it is observed from its effect by using fixed effect model, it can be seen that PAD dan DAU in total or partial can improve direct spending and indirect spending meanwhile population can reduce the improvement of direct spending. It is different with indirect spending which has positive effect because the growing of population in regency/city in Jambi can improve the allocation of employee spending meanwhile for direct spending especially for capital spending is not efficient.

Keywords: *Locally-Generated Revenue, General Allocation Fund, Budget*

I. PENDAHULUAN

Dalam menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasari oleh pemikiran bahwa pemerintah daerah jauh lebih memahami potensi, kondisi, dan permasalahan daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, setiap daerah juga lebih mengerti

besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Belanja daerah Provinsi Jambi selama tahun 2007 hingga 2012 menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 19,41% pertahun. Meskipun demikian pertumbuhan tersebut berfluktuasi antar tahun. Pada Tahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 46,17%, tetapi pada pada Tahun 2010 sempat mengalami penurunan sebesar 2,74%. Hal yang sama juga terjadi pada perkembangan belanja daerah pada

kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Rata-rata pertumbuhan belanja daerah kabupaten/kota selama Tahun 2007 – 2012 sebesar 17,04%, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2008 sebesar 25,79% dan terendah sebesar 2,85% pada Tahun 2009.

Selain fluktuasi dalam perkembangan belanja daerah, terdapat juga fenomena ketidakberimbangan alokasi belanja pemerintah antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung. Kondisi seperti ini juga ditemukan di seluruh kabupaten/kota yang berada dalam lingkungan Provinsi Jambi, baik daerah yang memiliki kemampuan fiskal relatif rendah maupun daerah yang kemampuan fiskalnya relatif lebih tinggi.

Proporsi alokasi dana APBD untuk belanja tidak langsung ditingkat kabupaten/kota jauh lebih besar bila dibandingkan dengan APBD pemerintah provinsi. Konsekuensinya optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki daerah sulit dicapai. Proporsi pengalokasian belanja langsung yang relatif kecil berimplikasi pada rendahnya efektivitas APBD dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta pengendalian tingkat kemiskinan absolut dan relatif.

Perkembangan dan alokasi belanja daerah ditentukan oleh penerimaan daerah yang bersangkutan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan

DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Halim, 2007).

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan. Aziz et.al (2000); Doi (1998); Von Furstenberg (1998), menyatakan dalam hipotesis penelitiannya bahwa penerimaan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Penerimaan daerah dapat bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006). Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan.

Terkait dengan dana perimbangan (transfer pemerintah pusat), Holtz-Eakin et al (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Studi Legrensi dan Milas (2001) di Italia menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja

daerah. Secara spesifik ditegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*. Gamkhar dan Oates (1996) menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cut in the federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Hal tersebut juga tidak berbeda dengan hasil penelitian Sukri & Halim (2004).

Selanjutnya, jumlah penduduk juga mempengaruhi belanja daerah. Jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (dana alokasi umum (DAU)), dan penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

II. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data APBD dan jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Jambi dalam rentang waktu Tahun 2007 – 2012. Data dikumpulkan dari instansi terkait dan berbagai buku/literatur yang relevan.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Untuk melihat pengaruh PAD, DAU, dan penduduk terhadap pengeluaran pemerintah yang berupa alokasi belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) digunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan asumsi bahwa ada perbedaan antara kabupaten/kota (variabel cross section) dalam mengelola keuangannya tanpa memperhatikan dimensi waktu anggaran (variabel time series) (Juanda dan Junaidi, 2012).

Regresi dengan menggunakan metode *common effect* dan *random effect* dalam penelitian ini kurang tepat untuk mengestimasi persamaan regresi data panel ini. Alasan tidak menggunakan metode *common effect* disebabkan asumsi intersep dan slope dari persamaan regresi yang dianggap konstan baik antar daerah maupun antar waktu tidak sesuai dengan realitas sebenarnya. Metode *random effect* tidak digunakan karena data yang diambil hanya bagian kecil dari populasi.

Ada dua model persamaan regresi dalam penelitian ini dengan spesifikasi model dasar sebagai berikut:

$$LY1it = \beta_0i + \beta_1LX1it + \beta_2LX2it + \beta_3LX3it + \mu 1it,$$

$$LY2it = \beta_0 i + \beta_1LX1it + \beta_2LX2it + \beta_3LX3it + \mu 2it,$$

Keterangan:

$L Y1$ = Log Belanja Langsung

$L Y2$ = Log Belanja Tidak Langsung

$L X1$ = Log PAD

$L X2$ = Log DAU

$L X3$ = Log Penduduk

β_0i = Konstanta ke i

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

$\mu 1, \mu 2$ = standar error

i = jenis kabupaten

t = waktu

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh PAD, DAU dan Penduduk terhadap Belanja Langsung

Estimasi terbaik (berdasarkan kriteria teori ekonomi, statistik maupun

ekonometri) dari model pengaruh PAD, DAU dan Penduduk terhadap Belanja Langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi diberikan sebagai berikut:

	$LY_{1it} = 15,65425 + 0,304009 L X_{1it} + 0,648727 L X_{2it} - 1,106464 L X_{3it}$			
t-test	=	(2,308908)	(3,162331)	(-3,523049)
t-pro	=	(0,0251)	(0,0027)	(0,0009)
t-tabel	=	2,00		
F-test	=	19,98574	F-prob = 0,000000	F-tabel = 2,76
R ²	=	0,838613		
DW-test	=	1,833286		

Uji Simultan (Uji-F) dan Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan persamaan diatas, diperoleh nilai F-hitungnya lebih besar dari nilai F-prob (19,98574>0,0000) pada tingkat keyakinan $\alpha = 5\%$. Artinya, H₀ ditolak dan H₁ diterima. Ini menunjukan bahwa secara bersama-sama PAD, DAU dan Penduduk berpengaruh signifikan terhadap perkembangan belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Dari perhitungan diperoleh nilai R² sebesar 0,838613. Hal ini menunjukan sekitar 83,86 persen naik turunnya belanja langsung dipengaruhi oleh perubahan PAD, DAU dan penduduk, dan sisanya 16,14 persen, dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan uji statistik parsial dengan tingkat keyakinan $\alpha = 5\%$, diperoleh nilai t-statistik untuk variabel PAD (β_1) yang nilainya lebih besar dari t-prob (2,308908>0,0251), artinya H₀ ditolak H₁ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa PAD selama periode 2007-2012 berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Jambi, meskipun kontribusi PAD masih dibawah 10 persen. Begitu juga dengan nilai t-statistik untuk variabel DAU (β_2) diperoleh nilai yang lebih besar dari t-prob (3,162331>0,0027), artinya H₀ ditolak H₁ diterima. Ini menunjukan

bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap perkembangan atau peningkatan belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Sedangkan nilai t-statistik untuk variabel Penduduk (β_3) diperoleh nilai yang lebih besar dari t-prob (3,162331>0,0009), artinya H₀ ditolak H₁ diterima. Ini menunjukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap peningkatan belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Selanjutnya untuk menghitung intersep (β_0) koefisien pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat dirumuskan :

intersep individu kab/kota i = intersep ke i (β_{0i}) + intersep keseluruhan (β_0)

Hasil perhitungan intersep belanja langsung Kabupaten/Kota dapat diperoleh sebagai berikut :

β_0 untuk Kab. Batanghari	=	15,338489
β_0 untuk Kab. Bungo	=	15,508446
β_0 untuk Kab. Kerinci	=	15,311628
β_0 untuk Kota Jambi	=	15,898562
β_0 untuk Kota Sungai Penuh	=	14,324553
β_0 untuk Kab. Merangin	=	15,643559
β_0 untuk Kab. Muaro Jambi	=	15,963541
β_0 untuk Kab. Sarolangun	=	15,674602
β_0 untuk Kab. Tanjab Barat	=	16,175648
β_0 untuk Kab. Tanjab Timur	=	16,048573
β_0 untuk Kab. Tebo	=	15,865917

Dari hasil persamaan regresi diatas secara keseluruhan bahwa nilai koefisien β_0 untuk Kabupaten/Kota sebesar 15,65425 artinya, apabila pada periode 2007-2012 tidak terjadi perubahan PAD,

tidak terjadi perubahan DAU dan tidak terjadi perubahan penduduk atau dengan asumsi konstan, maka belanja langsung untuk seluruh kabupaten/kota adalah 15,65 persen.

Koefisien regresi variabel PAD (β_1) diperoleh nilai sebesar 0,304009, artinya apabila terjadi kenaikan atau peningkatan PAD sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan belanja langsung sebesar 0,30 persen dengan asumsi bahwa penerimaan DAU dan jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jambi tidak terjadi perubahan atau konstan.

Koefisien regresi variabel DAU (β_2) diperoleh nilai sebesar 0,648727, artinya apabila terjadi kenaikan atau peningkatan DAU sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan belanja langsung sebesar 0,65 persen dengan asumsi bahwa penerimaan PAD dan jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jambi tidak terjadi perubahan atau konstan.

Koefisien regresi variabel Penduduk (β_3) diperoleh nilai sebesar -1,106464, artinya apabila terjadi kenaikan atau peningkatan Penduduk sebesar 1 persen, maka akan menurunkan belanja langsung sebesar 1,11 persen dengan asumsi bahwa penerimaan PAD dan DAU kabupaten/kota di Provinsi Jambi tidak terjadi perubahan atau konstan.

Dari hasil tersebut terlihat pemerintah daerah masih bergantung secara keuangan terhadap transfer dana dari pusat dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah yaitu untuk meningkatkan belanja langsungnya. Sehingga dapat disimpulkan penambahan jumlah penduduk dapat mengurangi belanja langsung, dikarenakan proporsi DAU yang cenderung untuk membiayai belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai. Akibatnya semakin banyak penambahan penduduk maka semakin menurunkan alokasi belanja langsung.

Hal ini dikarenakan alokasi belanja langsung khususnya belanja modal dan belanja barang jasa kabupaten/kota relatif berimbang setiap daerah sehingga menyebabkan pertumbuhan penduduk dapat mengurangi belanja langsung.

Dengan teknik estimasi Fixed Effect dari data panel ini juga dapat melihat perbedaan 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam mengelola keuangannya. Perbedaan itu dapat dilihat dari perbedaan koefisien β_0 (intersep) antar kabupaten/kota. Dalam hal ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki β_0 (intersep) tertinggi sebesar 16,175648 artinya bila mana ada perubahan PAD, DAU dan Jumlah Penduduk baik antar daerah maupun antar waktu, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja langsung sebesar 16,17 persen. Tingginya nilai intersep Kabupaten Tanjung Jabung Barat disebabkan total belanja daerah yang dikeluarkan untuk belanja langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertinggi dari kabupaten/kota lainnya. Sebaliknya Kota Sungai Penuh memiliki β_0 (intersep) terendah sebesar 14,324553 artinya bila mana ada perubahan PAD, DAU dan Jumlah Penduduk baik antar daerah maupun antar waktu, maka Kota Sungai Penuh mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja langsung sebesar 14,32 persen. Rendahnya nilai intersep disebabkan total belanja langsung yang dikeluarkan pemerintah Kota Sungai Penuh terendah dari Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini disebabkan Kota Sungai Penuh merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Kerinci yang secara bertahap mulai melakukan pembangunan daerahnya.

Dari penjelasan tersebut dapat terlihat upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengoptimalkan potensi pendapatan

yang dimiliki untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah dengan meningkatkan belanja langsung. Sedangkan sebaliknya Kota Sungai Penuh kurang mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki untuk sektor-sektor produktif melainkan digunakan untuk alokasi belanja lainnya yang bersifat konsumtif yang tidak berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. PAD dan DAU menunjukkan pengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi belanja langsung. Sedangkan koefisien jumlah Penduduk memiliki hubungan yang negatif terhadap belanja langsung pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
2. Dampak untuk peningkatan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi diharapkan Belanja Langsung diprioritaskan pada sektor Listrik, Air Minum dan Bangunan, sektor Pengangkutan dan sektor komunikasi tidak berdampak besar pada sektor-sektor lain yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Saran

1. Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka pemerintah daerah diharapkan bisa mampu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga pemerintah daerah agar terus mengupayakan untuk dapat menarik Dana Alokasi Umum untuk dialokasikan pada sektor publik agar penggunaannya menjadi efisien dan menjadi penerimaan daerah. Dan pemerintah mesti objektif dan selektif dalam pelaksanaan belanja langsung

agar sesuai dengan yang di harapkan masyarakat setempat.

2. Sebaiknya pemerintah daerah lebih transparan dalam penggunaan belanja langsung yang lebih produktif. Sehingga dengan ada peningkatan belanja langsung memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bahtiar. 2002. Akuntansi pemerintahan. Penerbit. Salemba 4: Jakarta.
- Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habibullah, W. N. W. Azman - Saini, & M. Azali, 2000. *The Causal Relationship between Tax Revenues and Government Spending in Malaysia*. Universiti Putra Malaysia, Working Paper.
- Bastian, Indra. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Penerbit. Salemba 4: Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit PT. Indeks: Jakarta.
- Chang, Tsangyao & Yuan Hong Ho. 2002. Tax or spend, what cause what: Taiwan's experience. *International Journal of Business and economics* 1 (2): 157-165.
- Daud, Muhammad. 2009. Analisis Derajat Kemandirian Keuangan 10 Kota Utama di Wilayah Sumatera Selama Otonomi Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Jambi.
- Devi, 2006. Analisis terhadap inflasi di Indonesia dengan menggunakan variabel PDB, nilai tukar dan jumlah uang beredar.
- Doi, Takero. 1998. *Is Japanese Local Finance Really Centralized? From Viewpoint of The Revenue-Expenditure Nexus*. University of Tokyo, Working Paper.
- Fhatur Rahman. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan

- Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah dan PAD di Provinsi Jambi. Universitas Jambi
- Gamkhar, Shama & Wallace Oates. 1996. Asymetries in response to increase And decrease in intergovernmental grants: Some empirical findings. *National Tax Journal* 49 (4):501-512.
- Ghozali, Imam, Arifin Sabeni. 1997. Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan. Edisi 4. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Guritno Mangkoesobroto,. 1993. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Halim, Abdul. 2001. Anggaran daerah dan “fiscal stress” (sebuah studi kasus pada Anggaran daerah provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16 (4): 346-357.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.
- Haryanto, Sahmuddin dan Arifuddin, 2007, *Akuntansi Sektor Publik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S. Rosen, & Schuyler Tilly. 1994. Intertemporal Analysis of state in local governemnt spending: Theory and test. *Journal Of Urban Economics* 35: 159-174.
- Juanda, B; Junaidi. 2012. Ekonometrika Deret Waktu; Teori dan Aplikasi. IPB Press. Bogor
- Kuncoro, M. 2006, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Ketiga, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Legrenzi. Gabriella & Costas Milas. 2001. Non-linier and asymetrics adjustment in the local revenue – expenditure models: some evidence from the Italian municipalities. University of Milan. *Working paper*.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen keuangan daerah. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik*, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Yogyakarta.
- Mangkusubroto, Guritno, 1994. Ekonomi Publik, BP FE-UGM, Yogyakarta.
- Nagathan, dan KJ Sivagnanan. 1999. “Federal Transfer and Tax Effort of States in India” *Indian Economic Journal*.
- Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007-2012 Provinsi Jambi : Dispenda Provinsi.
- Realisasi APBD Tahun 2007-2012Jambi Dalam Angka : BPS.
- Sekaran, Uman, *Research Method for Business : A skill Building Approach*, 7th Edition, New York: John Wiley and Sons, 2002.
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah disampaikan dalam rangka Orasi Ilmiah. Bandung, 10 April 2002.
- Sihombing. 2003. Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah di Indonesia tahun 1969-2000 menggunakan metode Error Correction Model (ECM).
- Soebagyo.2007. Analisis pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal regional terhadap stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Timur pada periode 1995-2004
- Sukirno, Sadono, 2003, Makroekonomi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko, 2000, Keuangan Negara; Dalam Teori dan Praktek, BPFE, Yogyakarta.

- Suparno, 2010, *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Tesis S2 Program Pasca sarjana Universitas Sumatra Utara, Medan
- Tambunan, TH, Tulus, 2006. *Perekonomian Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tarigan, Robinson. 2006. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Todaro, M.P 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh. Erlangga, Jakarta.
- Wijaya, Bayu dan Atmanti, Hastarini Dwi (2000). Analisis pengembangan wilayah dan sektor potensial guna mendorong pembangunan di Kota Salatiga. *Dinamika Pembangunan Vol.3 No.2, Desember 2000*